

LAPORAN KINERJA 2025



BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI BARAT
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
2025

LAPORAN KINERJA

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT



**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI BARAT
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
2025**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas izinnya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Laporan Capaian Kinerja BRMP Sulawesi Barat disusun dengan mengacu pada PERMENTAN No 45/PERMENTAN/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementan.

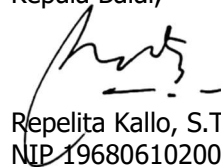
Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, maka pelaksanaan pembangunan pertanian, tata kelola manajemen, dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang berbasis kinerja harus dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, karena itu, substansi penyusunan LAKIN didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing kegiatan yang telah dituangkan dalam rencana kerja tahunan.

Buku Laporan Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Barat 2025 ini merupakan cerminan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian selama tahun 2025 dalam rangka pencapaian sasaran, yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan Kementerian Pertanian dalam upaya mencapai kinerja Kementerian Pertanian yang lebih baik, benar, transparan, dan akuntabel.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian laporan ini disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga laporan ini memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak yang membutuhkannya. Kritik dan saran kami harapkan demi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.

Mamuju, Desember 2025
Kepala Balai,



Repelita Kallo, S.TP, M.Si.
NIP.196806102005012002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) telah bertransformasi menjadi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang mempunyai tugas penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

BRMP Sulawesi Barat berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, BRMP Sulawesi Barat memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan Capaian Kinerja Teknis yang telah dilaksanakan atas pelaksanaan DIPA tahun anggaran 2025.

Tujuan BRMP Sulawesi Barat adalah: 1) Meningkatkan pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian, dengan indikator tujuan jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian, 2) Tersedianya teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif, dengan indikator tujuan jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik Lokasi, 3) Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator tujuan nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat, 4) Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator tujuan Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat.

Sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKKL) pada tahun 2025, maka dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, kegiatan BRMP Sulawesi Barat selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran strategis yaitu : 1) Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani, 2) Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif, 3) Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani,

terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada layanan Prima, 4) Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan Berkualitas.

Capaian indikator kinerja BRMP Sulawesi Barat berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2025 sebesar 100,68% atau termasuk dalam kategori sangat berhasil. Pada Tahun 2025, BRMP Sulawesi Barat telah melakukan pendampingan Lembaga yang menerapkan standar instrument pertanian sebanyak 1 lembaga yaitu Kelompok Tani Puncak Mandiri melalui kegiatan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian (teralisasi 100%). Pendampingan Lembaga juga dilaksanakan pada Kelompok Tani Harapan Mulyo, Sinar Maros, dan Padaelo dengan menerapkan standar SNI 6233:2015 tentang Benih Padi Inbrida dan Good Agricultural Practices (GAP) pada kegiatan Produksi Benih Sumber Spesifik Lokasi. Untuk indikator Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan telah tercapai 55 ton benih atau teralisasi 100%. Selain itu nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM BRMP Sulawesi Barat mencapai 85,47 (101,01%) dan capaian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 92,56 (101,71%).

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain disebabkan oleh adanya blokir anggaran, dimana sebagian blokir baru dibuka pertengahan Triwulan ke II sehingga pelaksanaan kegiatan baru dimulai dipertengahan Tahun 2025 dan adanya revisi anggaran berupa refocusing anggaran yang menyebabkan penyesuaian anggaran, adanya pemblokiran anggaran dan pemblokiran untuk penghematan anggaran perjalanan dinas, namun capaian output kegiatan diseminasi dan perbenihan dapat tercapai.

Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja BRMP Sulawesi Barat adalah Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait terutama dengan pihak pemerintah daerah dan sasaran utama, Mengoptimalkan peran Sumber Daya Manusia (SDM) BRMP Sulawesi Barat, dan Penyesuaian kembali rencana pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan tetap dapat tercapai diakhir tahun 2025 dan optimalisasi anggaran dengan cara penyesuaian anggaran untuk difokuskan ke bagian-bagian utama yang paling berpengaruh untuk mencapai target.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang	1
Tugas, Fungsi, dan Organisasi.....	3
II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	9
Visi	9
Misi.....	9
Tujuan.....	10
Kegiatan.....	10
Perjanjian Kinerja Tahun 2025	13
III. Akuntabilitas Kinerja	14
Capaian Kinerja	14
Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	18
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	18
2. Kinerja Kegiatan BRMP Sulawesi Barat TA. 2025	22
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025	31
4. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi	33
5. Akuntabilitas Keuangan	34
6. Pengelolaan PNBPN	35
7. Capaian Kinerja Lainnya	36
IV. Penutup	40
Lampiran	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BRMP Sulawesi Barat.....	4
Gambar 2. Nilai Kinerja pelaksanaan Anggaran BRMP Sulawesi Barat	22
Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian...	26
Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Produksi Benih Padi	31
Gambar 5 . Grafik Capaian LTT Reguler.....	37
Gambar 6. Grafik Capaian LTT Padi Gogo	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. SDM BRMP Sulawesi Barat Berdasarkan Jabatan Tertentu dan Sturuktural 2025.	7
Tabel 2. SDM BRMP Sulawesi Barat Berdasarkan Golongan Ruang 2025	7
Tabel 3. SDM BRMP Sulawesi Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2025	7
Tabel 4. Kegiatan dan Alokasi Anggaran BRMP Sulawesi Barat TA. 2025.....	13
Tabel 5. Perjanjian Kinerja BRMP Sulawesi Barat Tahun 2025	14
Tabel 6. Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja BRMP Sulawesi Barat Tahun 2025.....	16
Tabel 7. Capaian Indikator jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan BRMP Sulawesi Barat 2025	19
Tabel 8. Matriks Produksi Benih Pokok T.A. 2025	29
Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja BRMP Sulawesi Barat Tahun 2024 dan 2025	32
Tabel 10. Realisasi Anggaran berdasarkan Output Kegiatan Lingkup BRMP Sulawesi Barat 2025	35
Tabel 11. Realisasi Setoran PNBK BRMP Sulbar pada Tahun 2025	36
Tabel 12. Pelaporan Luas Tambah Tanam (LTT) Padi Reguler Provinsi Sulawesi Barat	37
Tabel 13. Realisasi Tanam Padi Lahan Kering Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja	42
Lampiran 2. Manual IKU	45

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor penting di Indonesia. Sektor pertanian memiliki peran penting terhadap ekonomi nasional, yang dapat dilihat dari kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, penyedia bahan pangan, bahan energi, pakan dan bahan baku industri, serta sumber pendapatan masyarakat di pedesaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) telah bertransformasi menjadi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang mempunyai tugas penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, BRMP memiliki fungsi yaitu (1) pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian, (2) pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern, (3) pelaksanaan produksi benih/ bibit sumber, dan penilaian kesesuaian, (4) pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian, (5) pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia, (6) pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian, (7) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian, (8) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Keberadaan BRMP ini membuka peluang yang lebih besar bagi tersedianya teknologi standar instrumen pertanian untuk mendukung

pembangunan pertanian di Propinsi Sulawesi Barat, sesuai dengan kebijakan, kondisi sumberdaya alam, sosial ekonomi pertanian dan budaya masyarakat setempat. Namun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, BRMP membutuhkan kerjasama dan dukungan banyak pihak, komunikasi yang intensif antar berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan petani sebagai subyek pembangunan daerah. Dimana semua komponen tersebut mempunyai peranan penting dalam bidang pertanian, baik dalam menanggapi isu-isu aktual di bidang pertanian khususnya dalam hal penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Sebagai instansi pemerintah dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, BRMP Sulawesi Barat harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan berdasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam bentuk Laporan Capaian Kinerja.

Laporan Capaian Kinerja BRMP Sulawesi Barat disusun dengan mengacu pada PERMENTAN No 45/PERMENTAN/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementan. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LAKIN memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik

bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, karena itu, substansi penyusunan LAKIN didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing kegiatan yang telah dituangkan dalam rencana kerja tahunan.

Pembuatan LAKIN BRMP Sulawesi Barat tahun 2025 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja pelaksanaan kegiatan BRMP Sulawesi Barat selama kurun waktu satu tahun serta sebagai laporan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025.

1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian yang berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian. Sedangkan fungsi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian adalah:

1. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
2. pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
3. pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian;
4. pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian;

5. pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia;
6. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
7. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan
8. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

BRMP Sulawesi Barat merupakan fungsi unit kerja Eselon III yang secara struktural adalah salah satu unit kerja di lingkup Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPPMP). Dalam pelaksanaan kegiatan, secara struktural Kepala Balai dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Struktur Organisasi BRMP Sulawesi Barat dapat dilihat pada gambar berikut (Gambar 1).



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BRMP Sulawesi Barat

Struktur organisasi BRMP Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terdiri dari:

- a. Kepala Balai
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Ketua Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian
- d. Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Pendampingan Modernisasi Pertanian
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi tersebut adalah:

1. Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, dan rumah tangga.
2. Ketua Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian
Melakukan penyiapan bahan penerapan dan diseminasi, penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan, pengelolaan produk instrumen dan layanan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
3. Ketua Tim Kerja Program Evaluasi, dan Pendampingan Modernisasi Pertanian
Melakukan penyusunan rencana kegiatan, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi, serta inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan modernisasi dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- c. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- d. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- e. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- f. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BRMP Sulawesi Barat Tahun 2025 didukung oleh 47 orang pegawai, terdiri atas 2 orang tenaga struktural, 7 orang penyuluh, 3 orang analis standardisasi, 2 Orang POPT Pertama, 2 orang analis sumber daya manusia aparatur pertama, 1 orang Analis APBN Pertama, 1 orang PBT Terampil, 1 orang pranata keuangan APBN terampil, 1 orang PMHP, 1 orang PBT, 2 orang arsiparis, 2 orang ASDMA, 1 orang pustakawan, 1 orang pranata computer, 1 orang pranata humas, 1 orang perencana, 2 orang teknisi litkayasa, dan 19 orang fungsional umum. Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi pegawai BPSIP Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel. 1 berikut:

Tabel 1. SDM BRMP Sulawesi Barat Berdasarkan Jabatan Tertentu dan Sturuktural 2025.

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Struktural	2
2.	Analisis Standardisasi	3
3.	Penyuluh	7
4.	POPT	2
5.	PMHP	1
6.	Analisis SDM Aparatur Pertama	2
7.	Analisis APBN Pertama	1
8.	Pranata Keuangan Terampil	1
9.	Arsiparis	2
10.	Pustakawan	1
11.	Pranata Komputer	1
12.	Pranata Humas	1
13.	Perencana	1
14.	Pengawas Benih Terampil	1
15.	Teknisi Litkayasa Terampil	2
16.	Fungsional Umum	19
Jumlah		47

Tabel 2. SDM BRMP Sulawesi Barat Berdasarkan Golongan Ruang 2025

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Golongan IV	4
2.	Golongan III	15
3.	Golongan II	4
4.	Golongan V (PPPK)	1
5.	Golongan VII (PPPK)	1
6.	Golongan IX (PPPK)	3
7.	PPPK PW	12
Jumlah		47

Tabel 3. SDM BRMP Sulawesi Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2025.

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	S3	0
2.	S2	8
3.	S1	17

4.	D4	3
5.	D3	4
6.	D2	0
7.	D1	0
8.	SLTA	13
9.	SLTP	0
10.	SD	2
Jumlah		47

Dengan dukungan SDM BRMP Sulawesi Barat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2025 berjalan sesuai target meskipun mengalami keterbatasan akibat adanya kebijakan pemblokiran anggaran oleh DJA Kemenkeu, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap skala, waktu, dan prioritas program dan berdampak pada optimalisasi pelaksanaan kegiatan di lapangan.

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi

BRMP Sulbar merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon 3 Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), yang secara hierarki merupakan unit fungsional BRMP. Berdasarkan hierarchical strategic plan, BRMP menyusun Rencana Aksi dari Visi, Misi, Kebijakan, dan Program BRMP, yang selanjutnya pada tataran rencana strategis BRMP dituangkan menjadi Rencana Operasional. Oleh karena itu, visi, misi, kebijakan, strategi, dan program BRMP 2025 mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Pertanian, yang selanjutnya akan menjadi visi, misi, kebijakan, strategi, dan program seluruh satuan kerja BRMP, termasuk BBPPMP dan BRMP Sulbar. Visi BRMP Sulbar mengacu kepada visi BBPPMP, visi BRMP dan visi Kementerian Pertanian, maka visi BRMP Sulbar kedepan, yaitu "Menjadi lembaga terkemuka di Provinsi Sulbar dalam penerapan modernisasi pertanian spesifik lokasi, mendukung pertanian yang maju, mandiri, dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong".

2.2 Misi

Misi BRMP Sulbar selaras dengan misi BBPPMP dan misi BRMP serta mendukung misi Kementerian Pertanian dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Menerapkan pertanian modern spesifik lokasi untuk mewujudkan ketahanan pangan.
2. Menerapkan pertanian modern spesifik lokasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian.

3. Melaksanakan dan mendiseminasikan pertanian modern serta peningkatan kapasitas SDM pertanian

2.3 Tujuan

BRMP Sulawesi Barat adalah unit pelaksana teknis melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian yang berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian.

Oleh karena itu, BRMP Sulawesi Barat memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan Capaian Kinerja Teknis yang telah dilaksanakan atas pelaksanaan DIPA tahun anggaran 2025. Dengan demikian tujuan BRMP Sulawesi Barat adalah:

1. Meningkatkan pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian, dengan indikator tujuan jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian
2. Tersedianya teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif, dengan indikator tujuan jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi
3. Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator tujuan nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat
4. Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator tujuan Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat.

2.4 Kegiatan

Sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKKL) pada tahun 2025, maka dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, kegiatan BRMP Sulawesi Barat selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran strategis yaitu :

Sasaran 1. Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani

Pada tahun anggaran 2025, BRMP Sulawesi Barat memiliki sasaran Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani, dengan indikator kinerja: Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Target 1 lembaga). Untuk mencapai **Indikator Kinerja** , BRMP Sulawesi Barat memiliki kegiatan, antara lain; Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

Sasaran 2. Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif

Pencapaian sasaran Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif dilakukan melalui Kegiatan Perbenihan, dengan indikator kinerja Jumlah benih/ bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan.

Pada Tahun 2025, BRMP Sulawesi Barat melakukan kegiatan Produksi benih padi kelas SS (Target 55 Ton).

Sasaran 3. Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani

Sasaran terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani dengan indikator Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern tidak terlaksana sesuai PK karena tidak ada target yang ditetapkan.

Sasaran 4. Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada layanan Prima

Tahun anggaran 2025, BRMP Sulawesi Barat memiliki target Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK, WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat sebesar 84,61.

Sasaran 5. Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan Berkualitas

Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat (Nilai) adalah 91.

Selain Empat sasaran tersebut di atas BRMP Sulawesi Barat pada tahun 2025 juga melakukan kegiatan layanan dukungan manajemen, fasilitasi dan instrumen teknis dalam pelaksanaan kegiatan BSIP yaitu:

1. Layanan Dukungan Manajemen Internal;
 - a) Layanan Perkantoran
 - b) Layanan Pengelolaan PNB
 - c) Operasional Pemeliharaan Kantor
 - d) Layanan BMN; Pengelolaan Kebun Percobaan dan Laboratorium, UPBS dan sarana penunjang lainnya
 - e) Layanan Umum: Layanan Kerumahtanggaan dan umum, Pengelolaan Ketatausahaan dan sertifikasi ISO; Pengelolaan Manajemen SDM; Pengelolaan PPID dan Pustaka
 - f) Layanan Perkantoran; Pembayaran Gaji dan Tunjangan; Pembayaran gaji dan Tunjangan P3K
 - g) Operasional dan Pemeliharaan Kantor; Kebutuhan sehari-hari perkantoran; Langganan Daya dan Jasa; Pemeliharaan Perkantoran;
 - h) Layanan Perencanaan dan Penganggaran; Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, Sinkronisasi Satker
 - i) Layanan Pemantauan dan Evaluasi; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
 - j) Layanan Manajemen Keuangan; Pengelolaan Keuangan;

Selanjutnya program-program tersebut telah dicapai melalui beberapa kegiatan yang tertuang dalam RKKS BRMP Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025. Adapun masing-masing judul kegiatan dan alokasi anggarannya untuk Rencana Kinerja tahun 2025, dapat dilihat padaTabel 4 berikut:

Tabel 4. Kegiatan dan Alokasi Anggaran BRMP Sulawesi Barat TA. 2025

No	Sasaran	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	72.874.000	1 Lembaga
2	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern	876.300.000	55 Unit
3	Program Dukungan Manajemen -Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Layanan BMN	10.000.000	1 layanan
		Layanan Humas dan Informasi	14.800.000	1 layanan
		Layanan Umum	156.000.000	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	4.175.636.000	1 Layanan
		Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	1.948.607.000	
		Layanan Manajemen Keuangan	6.700.000	

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, pada tahun 2025, BRMP Sulawesi Barat menandatangani Perjanjian Kinerja Bersama Kepala BRMP. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian kinerja BRMP Sulawesi Barat tahun 2025 adalah sebagai berikut (Tabel 5):

Tabel 5. Perjanjian Kinerja BRMP Sulawesi Barat Tahun 2025.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
UTAMA				
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1.1. Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	1	Lembaga
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2.1. Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	-	Teknologi
		2.2. Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	55	Unit
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	3.1. Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern	-	Orang
LAINNYA				
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3.1. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat	84,61	Nilai
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat	91	Nilai

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penetapan sasaran dan tujuan dan pelaporan periodik yang mengindikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan.

Pengukuran keberhasilan kinerja suatu Instansi Pemerintah diperlukan indikator sebagai tolok ukur pengukuran. Pengertian indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BRMP Sulawesi Barat mengawali dengan perencanaan, yaitu dengan menyusun penggunaan sarana, sumber daya manusia, melalui suatu proses, menghasilkan suatu teknologi dan memberikan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat. Oleh karena itu faktor yang dapat dinilai dari tahapan ini adalah dalam bentuk kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan sampai dengan dampaknya bagi pengguna.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan

antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Target indikator kinerja sasaran berdasarkan pada Perjanjian Kinerja BRMP Sulawesi Barat, sedangkan realisasi keuangan berdasarkan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) tahun 2025. Mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan melalui rapat bulanan penanggung jawab kegiatan, pelaporan bulanan masing-masing kegiatan, serta seminar akhir tahun.

Dalam mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2025 tersebut, maka digunakan metode scoring yang mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian > 100%); (2) berhasil (capaian 80-100%); (3) cukup berhasil (capaian 60-<80%); dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan

Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target. Pada Tabel 6 disajikan capaian kinerja BRMP Sulawesi Barat berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) BRMP Sulawesi Barat Tahun 2025.

Tabel 6. Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja BRMP Sulawesi Barat Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase (%)
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	1	1	100
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	55	55	100

3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)	84,61	85,47	101,01
4	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)	91	92,56	101,71
Rata-rata					100,68

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat senantiasa berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (*input*), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (*proses*), serta keluaran (*output*). Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran pada tahun 2025. Informasi ini menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan dan dimanfaatkan untuk memberi gambaran kepada pihak internal dan eksternal mengenai sejauh mana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan kinerja BRMP Sulawesi Barat.

Tabel 6 diatas menunjukkan kinerja BRMP Sulawesi Barat secara keseluruhan pada tahun 2025 sebesar 100,68%, hal ini menunjukkan hasil yang telah mencapai kategori **sangat berhasil**. Penetapan kategori keberhasilan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu: (1) sangat berhasil jika capaian >100%; (2) berhasil jika capaian 80-100%; (3) cukup berhasil jika capaian

60-79%; dan (4) tidak berhasil jika capaian 0-59%. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana serta sumberdaya anggaran. Disamping itu, keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari telah diterapkannya Sistem Pengendalian Intern (SPI) lingkup BRMP Sulawesi Barat. Penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

3.2.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja BRMP Sulawesi Barat tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi. Penjelasan terkait analisi dan evaluasi pencapaian masing-masing indikator kinerja utama BPSiP Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

Sasaran 1:	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani
-------------------	---

Indikator Kinerja: Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan

Target indikator kinerja pertama adalah 1 (satu) Lembaga yang mendapatkan pendampingan dengan realisasi capaian sebanyak 1 standar Lembaga (tercapai 100%). Lembaga yang didampingi adalah Kelompok Tani Puncak Mandiri, melalui kegiatan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian. Pendampingan Lembaga juga dilaksanakan pada Kelompok Tani Harapan Mulyo, Sinar Maros, dan Padaelo dengan menerapkan standar SNI 6233:2015 tentang Benih Padi Inbrida dan Good Agricultural Practices (GAP) pada kegiatan Produksi Benih Sumber Spesifik Lokasi.

Sasaran 2:**Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif****Indikator Kinerja: Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan**

Capaian sasaran ke-2, diukur melalui jumlah benih/ bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan. Olehnya itu dari tabel sasaran strategis dan indikator Kinerja Kegiatan BRMP Sulawesi Barat TA. 2025 (tabel 6) dapat dilihat bahwa Jumlah benih/bibit sumber yang dihasilkan memiliki target 55 Unit dengan realisasi 55 (100%). Pada Tahun 2025, BRMP Sulawesi Barat melakukan kegiatan; 1) Produksi benih Padi Kelas SS (Target 50 Ton); 2) Produksi calon benih padi (Target 5 Ton). Capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Capaian Indikator jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan BRMP Sulawesi Barat 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah produksi benih Padi kelas SS	50 ton	50 ton	100
Jumlah produksi calon benih produksi benih padi kelas SS	5 ton	5 ton	100

Sasaran 3:**Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani****Indikator Kinerja : Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern**

Sasaran 3: Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Orang). sasaran 3 terkait Terwujudnya penerapan

pertanian modern oleh petani tidak ada target dan capaian dikarenakan tidak tersedia anggaran kegiatan.

Sasaran 4:	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
------------	---

Indikator Kinerja: Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)

Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang baik (*Good Governance*) telah menjadi agenda utama pemerintah Indonesia. Salah satu inisiatif yang mendorong terwujudnya tata kelola yang baik adalah Zona Integritas (ZI), yang bertujuan menciptakan wilayah pelayanan publik yang bebas dari korupsi, transparan, dan akuntabel. ZI menjadi fondasi penting dalam mencapai status Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), yang merupakan sasaran utama dari Reformasi Birokrasi di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Pada tahun anggaran 2025, BRMP Sulawesi Barat memiliki target Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK ,WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat sebesar 84,61. Dari Hasil penilaian mandiri pelaksanaan ZI oleh auditor dari Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi (BRMP Padi), Nilai ZI BSIP Sulawesi Barat sebesar 85,47 (tercapai 101,01%).

Sasaran 5:

Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Indikator Kinerja: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)

Pengimplementasikan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKKS mengacu pada aturan PMK Nomor 22 tahun 2021. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran di satuan kerja, termasuk Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Barat. IKPA bertujuan untuk mendorong efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian IKPA

dilakukan berdasarkan beberapa indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Nilai IKPA dihitung berdasarkan 12 indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Nilai ini mencerminkan seberapa baik satuan kerja mengelola anggarannya, dengan rentang nilai maksimal adalah **100**, dengan klasifikasi nilai **Baik**: ≥ 90 ; **Cukup**: 70–89; **Kurang**: < 70 . Olehnya itu nilai IKPA menjadi salah satu indikator keberhasilan BPSIP Sulawesi Barat dalam mendukung pelaksanaan program-program strategis Kementerian Pertanian di Sulawesi Barat.

Target indikator kinerja sasaran 4 dicapai dengan nilai 91 dari target nilai 92,56, atau sebesar 101,71% dari target yang ditetapkan (Baik). Capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini.

Indikator Pelaksanaan Anggaran

spanint.kemken.go.id/spanint/latest/app/#sintesa/NilaiKPASatker/indikatorKinerja

MONETPA

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER:

SAMPAI DENGAN | DESEMBER

Excel

PDF

Filter

SAKSI UT KAJAMAN

NO	KODE APPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSAI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI PELAKSANAAN DI DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANGA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	178	018	300957	BALAI PENCERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	83.73	100.00	90.00	100.00	100.00	100.00	92.56	100%	0.00	92.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.56	20.00	5.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Akhir		91.87		87.50			100.00				

Gambar 2. Nilai Kinerja pelaksanaan Anggaran BRMP Sulawesi Barat (5 Januari 2025)

3.2.2 Kinerja Kegiatan BRMP Sulawesi Barat TA. 2025

1. Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

Pemenuhan kebutuhan pangan nasional dihadapkan pada berbagai tantangan, baik di tingkat global maupun nasional. Krisis pangan global

yang dipicu oleh perubahan iklim, konflik geopolitik, serta fluktuasi harga pangan dunia berdampak langsung terhadap stabilitas pasokan dan harga pangan dalam negeri. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan pertanian produktif menyebabkan tekanan terhadap sistem produksi pangan nasional. Alih fungsi lahan sawah, degradasi lahan, serta penurunan kualitas sumber daya lahan semakin mempersempit ruang peningkatan produksi padi sawah (Nakano *et al.*, 2023).

Dalam konteks tersebut, pengembangan sistem pertanian lahan kering menjadi salah satu alternatif strategis untuk meningkatkan produksi padi nasional. Lahan kering memiliki potensi yang cukup luas dan sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal. Secara umum, sistem budidaya tanaman pangan di Indonesia terbagi ke dalam dua sistem utama, yaitu pertanian lahan basah (sawah) dan pertanian lahan kering (Agus Rachmat *dkk.*, 2020). Pengembangan padi lahan kering (padi gogo) menjadi semakin relevan sebagai upaya diversifikasi dan perluasan basis produksi padi, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan lahan sawah dan bergantung pada curah hujan.

Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi lahan kering yang cukup luas dan telah lama dimanfaatkan untuk usaha tani padi gogo. Namun demikian, produktivitas padi gogo di tingkat petani masih tergolong rendah dan belum mencapai potensi optimalnya. Data yang dihimpun di lapangan menunjukkan bahwa produktivitas padi gogo di lahan kering Sulawesi Barat umumnya berkisar 2-3 ton/ha, lebih rendah dibanding potensi hasil varietas unggul yang dapat mencapai di atas 5 ton/ha, sehingga masih terdapat kesenjangan hasil yang signifikan. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh belum optimalnya penerapan teknologi budidaya yang sesuai standar, keterbatasan akses petani terhadap informasi teknis, serta rendahnya tingkat adopsi standar instrumen pertanian. Praktik budidaya yang belum terstandar berpotensi

menurunkan efisiensi penggunaan input, meningkatkan risiko gagal panen, serta menghasilkan mutu gabah yang tidak optimal, terlebih dalam kondisi perubahan iklim dan ketidakpastian cuaca.

Kegiatan ini bertujuan terdiseminasinya standardisasi instrumen pertanian serta meningkatkan penerapan standar pertanian pada komoditi padi lahan kering di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Dalam melaksanakan kegiatan ini diawali dengan tahap persiapan. Hal ini dilakukan untuk pematangan tentang konsep kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan waktu, lokasi, narasumber dan materi yang akan disampaikan. Sementara itu untuk menyempurnakan konsep pelaksanaan kegiatan, dilakukan konsultasi ke instansi terkait yaitu Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar. Selain berkoordinasi di Dinas Pertanian dan Pangan, tim juga melakukan kunjungan ke Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Alu dan bertemu dengan Koordinator BPP serta para penyuluh pertanian lapangan (PPL). Pertemuan ini bertujuan untuk menyinergikan peran penyuluh dalam mendampingi petani selama pelaksanaan kegiatan diseminasi dan penerapan teknologi.

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Padi Gogo Mendukung Program Strategis Kementerian Pertanian dilaksanakan di Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar. Peserta kegiatan BIMTEK Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Padi Gogo Mendukung Program Strategis Kementerian Pertanian berjumlah 100 orang yang terdiri dari 80 petani dan 20 penyuluh pertanian. Kegiatan ini diikuti oleh petani dari Kecamatan Alu dan penyuluh pendamping lapangan (PPL).

Hasil kegiatan melalui *pre-test* menunjukkan bahwa sebelum mengikuti kegiatan BIMTEK, jumlah peserta yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar adalah **57,88%**, hal ini mencerminkan tingkat pengetahuan awal peserta sebelum adanya intervensi. Sedangkan hasil

analisis *Post-Test* menunjukkan persentase peserta yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar menjadi **67,50%**, meningkat sebesar **9,62%**. Ini menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan peserta setelah adanya intervensi melalui kegiatan BIMTEK.

Untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha tani melalui kegiatan pendampingan penerapan Standar Instrumen Pertanian (SIP) pada komoditas padi gogo, dilaksanakan pendampingan sebagai tindak lanjut dari sosialisasi standar yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani dan penyuluh dalam menerapkan teknologi dan standar budidaya padi gogo secara tepat, efisien, dan berbasis kondisi spesifik lokasi. Salah satu fokus utama kegiatan adalah pemahaman status hara tanah sebagai dasar pengelolaan pemupukan yang berimbang dan tepat sasaran.

Dalam kegiatan tersebut, Tim BRMP Sulbar melakukan pengujian kadar hara tanah menggunakan Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK). Sampel tanah diambil langsung dari lahan salah satu kelompok tani setempat untuk memastikan hasil analisis mencerminkan kondisi riil lapangan. PUTK digunakan untuk mengidentifikasi kandungan unsur hara utama seperti Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K) serta tingkat keasaman tanah (pH). Di samping pengujian kandungan hara tanah dan pembuatan pupuk kompos, kegiatan yang dilakukan adalah mengajak petani untuk melakukan identifikasi serangan OPT pada pertanaman padi gogo. Hal ini untuk membekali petani dan penyuluh dengan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam identifikasi dini Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Untuk melihat dampak dari kegiatan dilakukan monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring menunjukkan bahwa secara umum petani memiliki semangat dan komitmen yang cukup baik dalam menerapkan Standar Instrumen Pertanian yang telah disosialisasikan. Dampak positif

pendampingan mulai terlihat, salah satunya adanya perubahan perilaku budidaya.



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

2. Produksi Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi

Benih padi terstandar/bersertifikat dari varietas unggul baru (VUB) padi diperlukan petani karena potensial untuk meningkatkan produktivitas usaha tani, dengan asumsi penggunaan sarana produksi lainnya optimal,

seperti pupuk, pestisida, irigasi dan tenaga kerja. Pemerintah senantiasa berusaha agar peningkatan produktivitas dicapai secara maksimal. Hal ini sangat terkait dengan kebutuhan pangan yang terus meningkat sebagai akibat dari peningkatan jumlah penduduk, alih fungsi lahan produktif ke non produktif, tuntutan konsumen terhadap kualitas produk, persaingan pasar yang semakin ketat, serta perubahan lingkungan strategis lainnya yang akan berpengaruh terhadap pembangunan di sektor tanaman pangan. Dalam rangka menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan serta tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan pendapatan petani, diperlukan adanya ketersediaan benih dengan varietas yang berdaya hasil tinggi dan mutu yang baik. Daya hasil yang tinggi serta mutu yang terjamin pada umumnya terdapat pada varietas unggul. Keunggulan genetik dari satu varietas unggul hasil perakitan genetik yang dilakukan oleh para pemulia akan dapat dirasakan manfaatnya apabila tersedia dalam jumlah yang cukup untuk ditanam oleh petani.

Tujuan dari kegiatan ini yaitu memproduksi benih sumber padi kelas benih pokok (SS) sebanyak 50 ton dan mendiseminasikan benih sumber padi terstandar spesifik lokasi kepada pengguna di Sulawesi Barat.

Ruang lingkup kegiatan produksi benih sumber padi spesifik Lokasi dimulai dari koordinasi dengan pihak terkait kemudian identifikasi Lokasi. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi diantaranya adalah: kemudahan akses ke lokasi produksi (kondisi jalan, transportasi), kondisi fisik lokasi dan isolasi. Lahan untuk produksi benih sebaiknya adalah lahan bera atau lahan bekas pertanaman varietas yang sama. Kondisi lahan subur dengan air irigasi dan saluran drainase yang baik, bebas dari sisa-sisa tanaman/varietas lain. Isolasi jarak minimal antara 2 varietas yang berbeda adalah 3 meter. Penentuan lokasi ditentukan secara purposive melalui kegiatan koordinasi dengan petani, PPL/PBT atau dinas terkait di tingkat Kabupaten.

BRMP Sulawesi Barat melalui Kegiatan Benih sumber padi spesifik lokasi dengan tujuan membantu mempercepat penyebaran VUB dan melayani permintaan benih padi pengguna/petani maupun stakeholder. Berdasarkan koordinasi dan hasil survey maka kegiatan Benih sumber padi spesifik lokasi dilaksanakan di Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju seluas 8 Ha dengan memproduksi kelas benih pokok (SS) sebanyak 24.100 Kg yang terdiri dari varietas Inpari 32 HDB 12.000 Kg dan Padjadjaran Agritan 12.100 Kg, sedangkan di Desa Bumi Ayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar luas lahan produksi benih sumber padi 9 Ha dengan target produksi 26.100 Kg varietas Inpari 42 Agritan GSR. Penanaman dilakukan dalam beberapa tahap tergantung musim tanam dan kesiapan lahan. Penanaman pertama dilakukan pada tanggal 25 Mei 2025 di Desa Bumi Ayu kemudian menyusul penanaman kedua pada tanggal 18 Agustus 2025. Keunggulan utama varietas Inpari 42 Agritan GSR adalah produktivitas tinggi (potensi hingga 10.58 ton/ha GKG), agak tahan terhadap hama penyakit, termasuk toleransi terhadap wereng batang coklat dan hawar daun bakteri, menjadikannya varietas "Green Super Rice" yang efisien input dan cocok untuk lahan sawah irigasi dataran rendah. Sedangkan Varietas Inpari 32 HDB memiliki keunggulan tahan terhadap penyakit Hawar Daun Bakteri (HDB), produktivitas tinggi (potensi hingga 8,42 ton/ha GKG), serta rasa nasi pulen seperti Ciherang, menjadikannya favorit petani di lahan irigasi. Selain itu, ditanam dan dikembangkan juga varietas Padjadjaran Agritan yang memiliki keunggulan umur yang sangat genjah (sekitar 105 hari), tahan rebah, tekstur nasi pulen, dan toleran terhadap wereng batang coklat (WBC) biotipe 1 dan 2, serta penyakit hawar daun bakteri (HDB) strainIII, membuatnya cocok untuk percepatan panen dan mengurangi risiko gagal panen.

Produksi benih pokok diperoleh melalui kerjasama dengan petani/pemilik lahansawah. Lahan tersebut bertempat di Desa Bumiayu seluas 9 Ha denganmengembangkan varietas inpari 42 Agritan GSR. Penanaman dilakukan pada akhir MT.II yaitu tanggal 25 Mei 2025 kemudian menyusul penanaman varietas Inpari 32 HDBdan Padjadjaran Agritan pada tanggal 18 Agustus 2025 yang masuk periode MT.III.Proses produksi benih di dalam pengawasan BPSB-TPH langsung dilaksanakan dari awal produksi lapangan sampai pada prosesing benih. Benih sumber yang digunakanadalah benih dasar (BD/FS) yang berasal dari UPBS (Unit Produksi Benih Sumber) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi (BRMP Padi) Subang, JawaBarat yang dihasilkan dan diawasi oleh pemulia tanaman serta memiliki sifat kemurnianyang sangat tinggi.

Tabel 8. Matriks Produksi Benih Pokok T.A. 2025

No. dan Lot.	Lokasi Tanam (Desa, Kec./Kab.)	Luas Pertanaman (Ha)	Varietas dan Kelas Benih	Tgl. Tanam	Tgl. Panen	Target Produksi (Kg)	Jumlah Calon Benih (Kg)	Realisasi (Kg)
MT.II								
1. Lot BRMP.01	Desa Bumiayu, Kecamatan	5.00	Inpari 42 Agritan GSR (SS)	25/05/2025	27/08/2025	26.000	19.017	15.550
2. Lot BRMP.02	Wonomulyo, Kabupaten Polman	4.00	Inpari 42 Agritan GSR (SS)	25/05/2025	27/08/2025		12.983	10.550
MT.III								
3. Lot 1A-BRMP	Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju	3.00	Padjadjaran Agritan (SS)	18/08/2025	10/11/2025	12.000	8.923	7.100
4. Lot 1B-BRMP		1.00	Padjadjaran Agritan (SS)	18/08/2025	10/11/2025		6.261	5.000
5. Lot 2A-BRMP		2.00	Inpari 32 HDB (SS)	18/08/2025	20/11/2025	12.000	8.340	6.000
6. Lot 2B-BRMP		2.00	Inpari 32 HDB (SS)	18/08/2025	20/11/2025		8.197	6.000
Jumlah		17.00				50.000	63.721	50.200

Tabel 8. menunjukkan bahwa perbanyakkan benih sumber padi yang dilaksanakan di Desa Bumi Ayu dan Desa Beru-Beru diperoleh total calon benih sebanyak 63.721 kg GKP dari luasan 17 Ha. Setelah melalui tahap prosesing dan uji lab di BPSB-TPH diperoleh benih sebanyak 50.200 kg GKG dengan varietas Inpari 42 Agritan GSR sebanyak 26.100 Kg GKG, Padjadjaran Agritan 12.100 Kg GKG dan Inpari 32 HDB 12.000 Kg GKG.

Produksi benih sumber dengan kelas benih pokok yang dihasilkan tersebut telah memenuhi target dari 50.000 Kg GKG menjadi 50.200 kg GKG atau terjadi peningkatan sekitar 200 Kg GKG atau 0,4 %.





Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Produksi Benih Padi

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025

Perbandingan capaian kinerja antara Tahun 2024 dan 2025 digunakan untuk membandingkan efektivitas dan efisiensi kinerja BRMP Sulbar. Perbandingan kinerja ini menunjukkan seberapa jauh kemampuan satker mencapai target yang sama pada tahun yang berbeda. Selain itu hal ini bisa dijadikan bahan evaluasi terkait kinerja satker dan penentuan kebijakan terkait target satker di tahun-tahun berikutnya. BRMP Sulbar pada Tahun 2024 dan 2025 memiliki sasaran dan indikator kinerja yang hampir sama namun dengan target yang berbeda. Target capaian kinerja di Tahun 2025 mengalami kenaikan dibanding dengan target capaian kinerja pada Tahun 2024. Adapun perbandingan capaian kinerja BRMP Sulbar Tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja BRMP Sulawesi Barat Tahun 2024 dan 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			T	R	%	T	R	%
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	1	100	-	-	-
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1	100	-	-	-
	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	-	-	-	1	1	100
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	23,5	23,5	100	-	-	-
	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	-	-	-	-	-	-
		Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	-	-	-	55	55	100
3.	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern	-	-	-	-	-	-
4.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrume Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)	82	84,61	103,18			

	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat				84,61	85,47	101,01
5.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSIP Sulbar (Nilai)	96,93	98,57	101,69			
	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat				91	92,56	101,71
Capaian Indikator Kinerja						100,97		100,68

3.2.4 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

Keberhasilan

Secara umum BRMP Sulawesi Barat pada tahun 2025 telah menunjukkan hasil yang telah mencapai keberhasilan sebagaimana telah ditetapkan pada perjanjian kinerja pada tahun 2025. Keberhasilan capaian kegiatan pada tahun 2025 didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi. Selain itu didukung pula oleh: (1) kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan, (2) kesiapan dan kerjasama yang sinergis antara sumberdaya manusia (penyuluh, analis standarisasi, fungsional lainnya dan tenaga administrasi) dan (3) sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Kendala

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain disebabkan oleh adanya Blokir Anggaran, dimana sebagian blokir baru dibuka pertengahan Triwulan ke II sehingga pelaksanaan kegiatan baru dimulai dipertengahan Tahun 2025 dan adanya revisi anggaran berupa refocusing anggaran yang menyebabkan penyesuaian anggaran, adanya pemblokiran anggaran dan pemblokiran untuk penghematan anggaran perjalanan dinas, namun capaian output kegiatan diseminasi dan perbenihan dapat tercapai.

Langkah Antisipasi

Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja BRMP Sulawesi Barat adalah:

1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait terutama dengan pihak pemerintah daerah dan sasaran utama.
2. Mengoptimalkan peran Sumber Daya Manusia (SDM) BRMP Sulawesi Barat.
3. Penyesuaian kembali rencana pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan tetap dapat tercapai diakhir tahun 2025 dan optimalisasi anggaran dengan cara penyesuaian anggaran untuk difokuskan ke bagian-bagian utama yang paling berpengaruh untuk mencapai target.

3.2.5 Akuntabilitas Keuangan

Realisasi Anggaran

Salah satu faktor yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan BRMP Sulawesi Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya (Tupoksi) dalam diseminasi dan penerapan modernisasi pertanian adalah dukungan ketersediaan dana yang memadai. Dalam melaksanakan tupoksinya sebagai unit pelaksana teknis di bidang penerapan standar dan modernisasi pertanian, BRMP Sulawesi Barat pada TA. 2025 didukung oleh

sumber dana yang berasal dari Dana APBN yang tertera dalam DIPA BPSIP Sulawesi Barat dengan alokasi dana sebesar sebesar **Rp. 5.910.315.000,-**.

Realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rincian Kertas Satker. Realisasi keuangan BRMP Sulawesi Barat sampai dengan akhir TA. 2025 mencapai **Rp. 5,896,889,332,-** (99,77%) dari total anggaran yang dialokasikan dalam DIPA TA. 2025. Secara rinci, realisasi per output dapat dilihat pada tabel 10 berikut:

Tabel 10. Realisasi Anggaran berdasarkan Output Kegiatan Lingkup BRMP Sulawesi Barat 2025

Program/ Kegiatan/ Output	Pagu	Realisasi	%
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat	5,910,315,000	5,896,889,332	99.77
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	72,874,000	72,874,000	100
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	72,874,000	72,874,000	100
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	876,300,000	876,080,000	99.77
Perakitan dan Modernisasi Pertanian	876,300,000	876,080,000	99.77
Program Dukungan Manajemen	4,961,141,000	4,947,935,332	99.73

3.2.6 Pengelolaan PNB

BRMP Sulawesi Barat merupakan salah satu satker penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BRMP Sulawesi Barat sebesar **Rp3.920.000.**

Tabel 11. Realisasi Setoran PNBP BRMP Sulbar pada Tahun 2025

No	Akun Pendapatan	Jenis PNBP	Realisasi Setoran (Rp)
1	(425122) Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Umum	3.575.000
2	(425112) Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	Khusus	152.860.000
Total			153.435.000

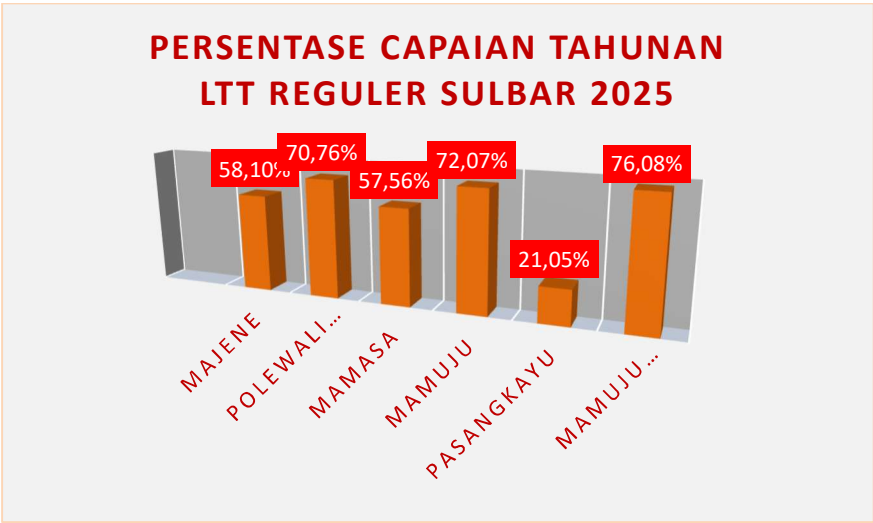
3.2.7 Capaian Kinerja Lainnya
Luas Tambah Tanam Padi Reguler

Program Luas Tambah Tanam (LTT) padi reguler di Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan secara menyeluruh pada enam kabupaten, yaitu Kabupaten Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu. Pelaksanaan program ini didukung oleh luas baku sawah (LBS) Provinsi Sulawesi Barat sebesar 42.905 hektare yang menjadi dasar perencanaan dan distribusi target LTT padi reguler di masing-masing wilayah, dengan mempertimbangkan potensi lahan, kondisi agroekologi, serta dukungan sarana dan prasarana pertanian yang tersedia.

Berdasarkan target yang ditetapkan, LTT padi reguler Provinsi Sulawesi Barat tahun berjalan sebesar 114.412 hektare. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi LTT padi reguler tercatat mencapai 74.864 hektare atau sebesar 65,43 persen dari target. Capaian ini menunjukkan adanya upaya percepatan tanam yang cukup signifikan, meskipun masih diperlukan langkah-langkah strategis dan pendampingan berkelanjutan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan meningkatkan realisasi LTT sesuai target yang telah ditetapkan.

Tabel 12. Pelaporan Luas Tambah Tanam (LTT) Padi Reguler Provinsi Sulawesi Barat

Kabupaten/Kota	Realisasi Jan-Des 25	LBS SULBAR	TARGET TAHUNAN	SELISIH CAPAIAN REALISASI-	PERSENTASE CAPAIAN
Majene	1695,26	783	2918	-1222,74	58,10%
Polewali Mandar	32928,22	16832	46532	-13603,78	70,76%
Mamasa	19606,73	10564	34065	-14458,27	57,56%
Mamuju	16604,65	9319	23040	-6435,35	72,07%
Pasangkayu	745,44	946	3541	-2795,56	21,05%
Mamuju Tengah	3283,72	4461	4316	-1032,28	76,08%
Sulawesi Barat	74.864	42.905	114.412	(39.548)	65,43%



Gambar 5. Grafik Capaian LTT Padi Reguler Sulbar 2025

Luas Tambah Tanam Padi Gogo

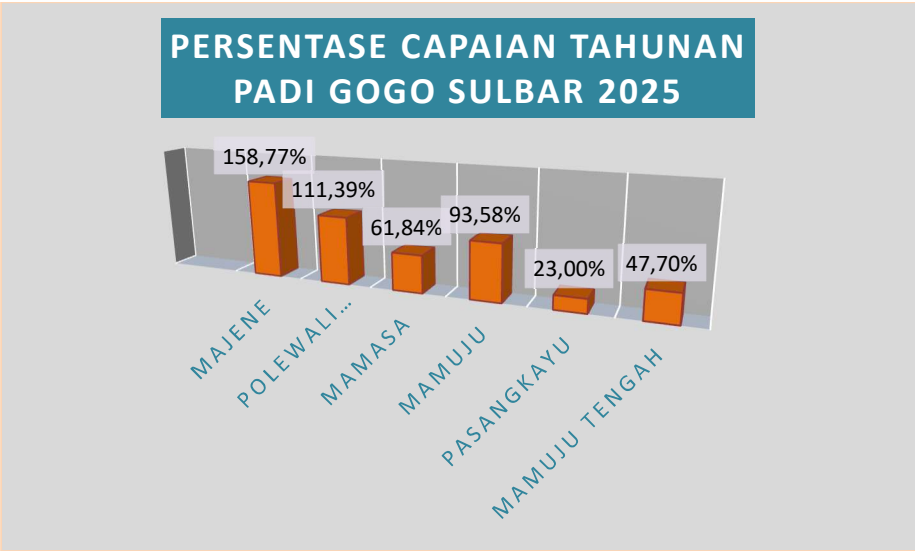
Pelaporan Luas Tanam Padi Lahan Kering di Propinsi Sulawesi Barat tahun 2025 merupakan bagian penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Kegiatan ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga menjadi indikator capaian program strategis nasional di sektor pangan. Melalui pelaporan yang akurat dan tepat waktu, data LTT menjadi dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan pertanian, sekaligus memperkuat

upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan serta mendorong kemandirian petani di wilayah Sulawesi Barat.

Capaian Luas Tanam Padi Lahan Kering (padi gogo) di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 5.429,74 Ha dari target yang ditetapkan sebesar 5.554 Ha, atau mencapai 97,76 persen. Capaian tersebut menunjukkan kinerja pelaksanaan program yang sangat baik dan memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pencapaian swasembada pangan nasional. Berikut ini laporan realisasi tanam padi gogo Sulawesi Barat.

Tabel 13. Realisasi Tanam Padi Lahan Kering Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Realisasi Jan-Des 25	TARGET TAHUNAN	SELISIH CAPAIAN REALISASI-TARGET 2025	PERSENTASE CAPAIAN TAHUNAN
1	Majene	1783,00	1123,00	660	158,77%
2	Polewali Mandar	1640,81	1473,00	167,81	111,39%
3	Mamasa	832,30	1346,00	-513,7	61,84%
4	Mamuju	850,63	909,00	-58,37	93,58%
5	Pasangkayu	11,50	50,00	-38,5	23,00%
6	Mamuju Tengah	311,50	653,00	-341,5	47,70%
Sulawesi Barat		5.429,74	5.554,00	(124,26)	97,76%



Gambar 6. Grafik Capaian LTT Padi Gogo Per Kabupaten 2025

PPID Informatif

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Informatif adalah predikat tertinggi hasil monitoring-evaluasi keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi, menandakan badan publik tersebut proaktif, transparan, dan mudah diakses dalam menyediakan informasi publik (berkala, serta-merta, setiap saat).

Pada tahun 2025 BRMP Sulbar mendapat predikat “**informatif**” dalam monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 untuk kategori eselon III.

IV. PENUTUP

4.1 Simpulan

Capaian sasaran BRMP Sulawesi Barat tahun 2025 diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja. Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan pada tahun 2025 telah tercapai melebihi target yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja BRMP Sulawesi Barat berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2025 sebesar 100,68% atau termasuk dalam kategori **sangat berhasil**. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana penerapan dan diseminasi serta sumberdaya anggaran. Disamping itu, penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan penerapan dan diseminasi dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal.

Pada Tahun 2025, BRMP Sulawesi Barat telah melakukan pendampingan Lembaga yang menerapkan standar instrument pertanian sebanyak 1 lembaga yaitu Kelompok Tani Puncak Mandiri melalui kegiatan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian. Pendampingan Lembaga juga dilaksanakan pada Kelompok Tani Harapan Mulyo, Sinar Maros, dan Padaelo dengan menerapkan standar SNI 6233:2015 tentang Benih Padi Inbrida dan Good Agricultural Practices (GAP) pada kegiatan Produksi Benih Sumber Spesifik Lokasi. Untuk indikator Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan telah tercapai 55 ton benih atau terealisasi 100%. Selain itu nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM BRMP Sulawesi Barat mencapai 85,47 dan capaian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 92,56.

1.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja kegiatan diseminasi dan penerapan modernisasi dan standar Instrumen Pertanian adalah:

1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait terutama dengan pihak pemerintah daerah dan sasaran utama.
2. Mengoptimalkan peran Sumber Daya Manusia (SDM) BRMP Sulawesi Barat.
3. Penyesuaian kembali rencana pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan tetap dapat tercapai diakhir tahun 2025 dan optimalisasi anggaran dengan cara penyesuaian anggaran untuk difokuskan ke bagian-bagian utama yang paling berpengaruh untuk mencapai target.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Repelita Kallo
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jakarta, Desember 2025
Pihak Pertama

Fadry Djufry


Repelita Kallo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
UTAMA				
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1.1. Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	1	Lembaga
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2.1. Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	-	Teknologi
		2.2. Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	55	Unit
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	3.1. Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern	-	Orang
LAINNYA				
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3.1. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat	84,61	Nilai
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat	91	Nilai

Kode	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	
EC	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	72.874.000
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Rp	72.874.000
	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan		
HA	Berkualitas	Rp	876.300.000
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp	876.300.000
WA	Dukungan Manajemen	Rp	5.355.636.000
6918	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp	5.355.636.000
		Rp	6.304.810.000

Total anggaran terblokir senilai Rp.394.495.000 terdiri dari:

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp 0
- Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp 0
- Program Dukungan Manajemen Rp 394.495.000

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Pihak Pertama


Repelita Kallo

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2025

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Tersedianya teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/ bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	Produksi Benih Padi kelas FS	0	Ton
		Produksi Calon Benih Padi kelas FS	0	Ton
		Produksi Benih Padi kelas SS	50	Ton
		Produksi Calon Benih Padi kelas SS	5	Ton
TOTAL			55	Ton

Lampiran 2. Manual IKU

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT

Sasaran dan Indikator Kinerja: BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1. Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah)	Lembaga
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2. Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	Teknologi
		3. Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	Unit
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	4. Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern (Jumlah)	Orang
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	5. Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)	Nilai
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)	Nilai

1. Manual Indikator 1: Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan

Program	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun berjalan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun
	Formula Menghitung jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun berjalan
	Tujuan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian
Satuan	%
Target	2025: 1 Lembaga 2026: 1 Lembaga 2027: 1 Lembaga 2028: 2 Lembaga 2029: 2 Lembaga
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat
Unit Organisasi	Tidak ada

Lain yang Terlibat	
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)
Polarisasi	☒ Maximaize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Unit/ Pihak Penyedia Data	BRMP Penerapan
Sumber Data	BRMP Penerapan
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan

Mitigasi Risiko		
	Potensi Risiko	Mitigasi
	rendahnya jumlah lembaga yang menerapkan standar	Pendampingan teknis berkelanjutan, dan pelatihan berbasis praktik.
	Penerapan standar tidak konsisten	Monitoring dan evaluasi berkala, dan penggunaan checklist penerapan standar di tingkat lapang
Catatan		

2. Manual Indikator 2: Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)

Program	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif pada tahun berjalan
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Jumlah teknologi pertanian yang adaptif pada tahun berjalan.
	Formula Jumlah teknologi pertanian adaptif yang dihasilkan pada tahun berjalan
	Tujuan mendapatkan mengukur kinerja dan capaian teknologi pertanian adaptif sebagai dasar perumusan kebijakan, mengukur daya saing, maupun kesenjangan digital/modernisasi
Satuan	%
Target	2025: 0 2026: 1 Teknologi 2027: 1 Teknologi 2028: 1 Teknologi 2029: 1 Teknologi
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi / Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi/BBPPMP
Unit Organisasi	Tidak ada

Lain yang Terlibat	
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Unit/ Pihak Penyedia Data	BRMP Penerapan
Sumber Data	BRMP Penerapan
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan

Mitigasi Risiko		
	Potensi Risiko	Mitigasi
	Teknologi kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.	Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.
	Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani	Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun r sederhana.
	Minimnya dukungan kelembagaan dan pendampingan	Optimalisasi peran penyuluh, serta diseminasi teknologi adaptif ke stakeholders lainnya.
Catatan		

3. Manual Indikator 2: Jumlah benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan

Program	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase produksi benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan (%)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Benih/Bibit Spesifik Lokasi adalah benih atau bibit yang dikembangkan dan diproduksi berdasarkan kesesuaian dengan kondisi agroekosistem di suatu wilayah.
	Formula Jumlah benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan pada tahun berjalan
	Tujuan untuk menyediakan benih/bibit spesifik lokasi yang unggul dan bermutu, adaptif terhadap kondisi agroekosistem setempat, dan terjamin ketersediaannya, sehingga mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi usaha tani, ketahanan terhadap cekaman biotik dan abiotik, serta keberlanjutan.
Satuan	Unit
Target	2025: 55 2026: 78 2027: - 2028: - 2029: -
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi / Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi/BBPPMP

Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Unit/ Pihak Penyedia Data	BRMP Penerapan
Sumber Data	BRMP Penerapan
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir

Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan	
Mitigasi Risiko		
	Potensi Risiko	Mitigasi
	Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat	Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya
	Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.	Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam yang tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat
	Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.
Catatan		

4. Manual Indikator 4: Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Jumlah)

Program	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Jumlah)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern pada tahun berjalan.
	Formula Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern
	Tujuan Untuk melihat gambaran tingkat penerapan modernisasi pertanian di tingkat pelaku utama, sebagai dasar evaluasi efektivitas diseminasi teknologi, peningkatan kapasitas petani, serta percepatan transformasi pertanian menuju sistem yang lebih produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan
Satuan	Unit
Target	2025: 0 2026: 0 2027: - 2028: - 2029: -
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi/BBPPMP
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada

Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)
Polarisasi	☒ Maximaize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Unit/ Pihak Penyedia Data	BRMP Penerapan
Sumber Data	BRMP Penerapan
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan

Mitigasi Risiko		
	Potensi Risiko	Mitigasi
	Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat	Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya
	Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.	Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam secara tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat.
	Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.
Catatan		

5. Manual Indikator 5: Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian

Program	Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
Definisi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien melalui tata kelola yang akuntabel, proses kerja terstandar dan berbasis digital, serta pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada layanan prima.
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian adalah tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang terukur melalui pemenuhan komponen pengungkit dan hasil, yang mencerminkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, bebas dari korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
	Formula 1. Untuk satker yang dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai yang dikeluarkan oleh Tim PNPRB Inspektorat Jenderal 2. Untuk satker yang belum dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai hasil penilaian Tim Penilai PMPRB BRMP
	Tujuan Mewujudkan Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian yang berintegritas dan profesional melalui pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
Satuan	Nilai
Target	2025: 84,61 2026: 85,47 2027: 85,50 2028: 85,60 2029: 85,70

Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi / Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi/BBPPMP
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Unit/ Pihak	BRMP Penerapan

Penyedia Data		
Sumber Data	BRMP Penerapan	
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan	
Mitigasi Risiko		
	Potensi Risiko	Mitigasi
	Pembangunan ZI hanya bersifat administratif dan belum menjadi budaya kerja	Penetapan komitmen bersama, internalisasi nilai ZI, serta per kinerja berbasis integritas.
	Pemenuhan eviden tidak konsisten dan tidak berkelanjutan.	<i>updating</i> eviden berkala, serta penunjukan PIC untuk mengump eviden.
	Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian var pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lem sertifikasi.
	SOP tidak sepenuhnya diterapkan, layanan belum efektif, dan inovasi terbatas	Penyederhanaan SOP, digitalisasi layanan, dan pengembangan ir yang berdampak nyata
Catatan		

6. Manual Indikator 6: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)

Program	Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
Definisi Sasaran Kegiatan	Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas melalui pengelolaan anggaran yang tertib, transparan, patuh regulasi, serta efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kinerja..
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian yang tertuang dalam dokumen anggaran digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran berdasarkan PMK 214 tahun 2017 yang dipublikasikan menggunakan Aplikasi Online SMART DJA..
	Formula Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian secara otomatis akan dihitung secara otomatis dalam aplikasi SMART yang dibuat DJA Kemenkeu
	Tujuan Mendorong pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, patuh regulasi, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian kinerja..
Satuan	Nilai
Target	2025: 92,75 2026: 92,80 2027: 92,85 2028: 92,90 2029: 93,00
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak

Unit Organisasi / Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi/BBPPMP
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Unit/ Pihak Penyedia Data	BRMP Penerapan
Sumber Data	BRMP Penerapan

Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan	
Mitigasi Risiko		
	Potensi Risiko	Mitigasi
	Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang akurat	Penyusunan RPD dan kalender kegiatan yang realistis dan terukur
	Terjadi kesalahan SPM/SP2D, retur, dan penurunan nilai kepatuhan IKPA.	Standarisasi dokumen, review berjenjang, dan pemanfaatan sumber keuangan secara optimal.
	Proses tender/pengadaan tidak sesuai timeline sehingga menurunkan kualitas penyerapan	Penjadwalan pengadaan secara cermat, monitoring rutin, penguatan tim pengadaan
	Monitoring dan pengendalian anggaran belum optimal	Evaluasi bulanan indikator IKPA dan penyesuaian strategi pelaksanaan
Catatan		